



DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA

REALISASI APBN
TAHUN ANGGARAN 2016
Tanggal : 1 Januari s.d. 30 Juni 2016

(dalam triliun rupiah)

URAIAN	APBNP*	REALISASI	
		JUMLAH	%
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	1.786,2	634,7	35,5
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	1.784,2	634,1	35,5
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.539,2	522,0	33,9
a. Pajak Dalam Negeri	1.503,3	504,7	33,6
i. Pajak Penghasilan	855,8	286,8	33,5
- Migas	36,3	16,3	44,9
- Non - Migas	819,5	270,5	33,0
ii. Pajak Pertambahan Nilai	474,2	169,2	35,7
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	17,7	0,7	4,0
iv. BPHTB	0,0	0,0	0,0
v. Cukai	148,1	44,0	29,7
vi. Pajak lainnya	7,4	4,0	53,8
b. Pajak Perdagangan Internasional	35,9	17,3	48,3
i. Bea Masuk	33,4	16,0	48,0
ii. Bea Keluar	2,5	1,3	51,5
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	245,1	112,1	45,7
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	90,5	27,4	30,2
i. Migas	68,7	18,5	26,9
ii. Non Migas	21,8	8,9	40,9
b. Bagian Laba BUMN	34,2	24,8	72,7
c. PNBPN Lainnya	84,1	41,8	49,7
d. Pendapatan BLU	36,3	18,1	49,8
II. HIBAH	2,0	0,6	28,6
B. BELANJA NEGARA	2.082,9	865,4	41,5
I BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.306,7	481,3	36,8
1. Belanja Pegawai	342,4	156,9	45,8
2. Belanja Barang	304,2	94,6	31,1
3. Belanja Modal	206,6	44,4	21,5
4. Pembayaran Kewajiban Utang	191,2	87,3	45,6
a. Utang Dalam Negeri	174,0	79,8	45,9
b. Utang Luar Negeri	17,2	7,4	43,2
5. Subsidi	177,8	72,3	40,7
a. Subsidi Energi	94,4	51,0	54,1
i. BBM (Pertamina)	43,7	21,7	49,6
ii. Listrik (PLN)	50,7	29,4	57,9
b. Subsidi Non Energi	83,4	21,3	25,5
6. Belanja Hibah	8,5	0,2	2,3
7. Bantuan Sosial	53,4	22,9	42,9
8. Belanja Lainnya	22,5	2,8	12,3
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	776,3	384,0	49,5
1. Transfer ke Daerah	729,3	357,2	49,0
a. Dana Perimbangan	705,5	348,7	49,4
i. Dana Transfer Umum	494,4	277,8	56,2
- Dana Bagi Hasil	109,1	53,6	49,2
- Dana Alokasi Umum	385,4	224,2	58,2
ii. Dana Transfer Khusus	211,0	70,9	33,6
- Dana Alokasi Khusus Fisik	89,8	24,9	27,7
- Dana Alokasi Khusus Nonfisik	121,2	46,0	37,9
b. Dana Insentif Daerah	5,0	2,9	58,1
c. Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan DIY	18,8	5,6	29,8
i. Dana Otonomi Khusus	15,4	4,6	30,0
ii. Dana Tambahan Otonomi Khusus	2,9	0,5	18,9
iii. Dana Keistimewaan DIY	0,5	0,4	80,0
2. Dana Desa	47,0	26,8	57,1
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(105,5)	(143,4)	135,9
D. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (A - B)	(296,7)	(230,7)	77,7
E. PEMBIAYAAN	296,7	276,6	93,2
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	299,3	300,9	100,5
1. Perbankan dalam negeri	25,4	2,3	9,3
2. Non-perbankan dalam negeri	273,9	298,5	109,0
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)	(2,5)	(24,3)	961,5
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	73,0	13,2	18,1
a. Pinjaman Program	35,8	6,7	18,8
b. Pinjaman Proyek	37,2	6,4	17,3
2. Penerusan SLA	(5,8)	(0,3)	5,4
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN	(69,7)	(37,2)	53,3

Catatan :

* Pagu berdasarkan pagu pada UU Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU nomor 14 tahun 2015 tentang APBN TA 2016 yang disajikan berdasarkan klasifikasi akuntansi. Rincian Belanja Pemerintah Pusat mengacu pada R-Perpres tentang Rincian APBN Perubahan 2016 yang diterima dari DJA tanggal 2 Agustus 2016 (18.21 WIB).

(1) Laporan disusun berdasarkan data realisasi sementara s.d. 30 Juni 2016

PDB : Rp11.541 triliun (tahun 2015), Rp12.626 triliun (tahun 2016-APBNP)

(2) Laporan bersifat sangat sementara